

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI  
KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA**

**Alvira Tindi Sa'adah**

Prodi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[alviratindi02@gmail.com](mailto:alviratindi02@gmail.com)

**Anggareny Puspaningtyas**

Prodi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[anggraenypuspa@untag-sby.ac.id](mailto:anggraenypuspa@untag-sby.ac.id)

**Eddy Wahyudi**

Prodi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[eddywahyudi@untag-sby.ac.id](mailto:eddywahyudi@untag-sby.ac.id)

**ABSTRACT**

This research employs a qualitative approach with a descriptive type. The focus of this study is to explore and analyze information related to the implementation of the Family Hope Program (PKH) in the Semampir District. PKH is a social protection program set by the Indonesian government with the main goal of improving the quality of life and welfare of the community, especially poor and vulnerable families. The purpose of the research is to find out and analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) to improve community welfare in Semampir District, Surabaya City. The results of the research prove that the study program makes a significant contribution to improving community welfare. Clear PKH standards and objectives, as stated in PERMENSOS number 1 of 2018, have been successfully achieved through comprehensive implementation. The verification and validation process carried out by PKH assistants ensures that the assistance is right on target, has a positive impact, especially in increasing access to education and health for beneficiary families.

**Keywords:** *Implementation, Program, Welfare*

**ABSTRAK**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Fokus penelitian ini yakni menggali serta analisis informasi terkait implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Semampir. PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial yang ditetapkan pemerintah Indonesia dengan tujuan utama untuk peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat, terutama

keluarga miskin dan rentan. Tujuan penelitian untuk mengetahui serta analisa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Hasil penelitian membuktikan program telaah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Standar dan tujuan PKH yang jelas, seperti yang tercantum dalam PERMENSOS nomor 1 tahun 2018, berhasil tercapai melalui implementasi yang komprehensif. Proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pendamping PKH memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, memberikan dampak positif terutama dalam peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat.

**Kata kunci:** *Implementasi, Program, Kesejahteraan*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia telah mencapai banyak kemajuan sebagai negara berkembang. Salah satu dari masalah utama yang dihadapi suatu negara yakni masalah kemiskinan dalam bidang sosial ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan adanya beragam keterbatasan serta tidakmampunya masyarakat miskin untuk mengikuti perkembangan zaman global. Kemiskinan dapat berefek pada pencapaian tujuan serta cita-cita negara seperti yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 yakni mewujudkan masyarakat sejahtera. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri sesuai standar hidup kelompoknya, serta tidak mampu memanfaatkan kemampuan mental maupun fisik di kelompok tersebut (Soekanto, 2012:320).

Gambar 1.1 Jumlah serta Presentasi Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012-2023



Sumber: Badan Pusat Statistika (2023)

Berdasarkan data diatas pada bulan Maret 2023, prosentase penduduk miskin Indonesia yakni 9,36% mengalami penurunan 0,21% di September 2022 serta penurunan 0,18% di Maret 2022 dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2023

yakni 25,90 juta orang, mengalami penurunan 0,46 juta orang di September 2022 serta penurunan 026 juta orang di Maret 2022.

Kriteria kemiskinan yang ditekankan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia memang lebih rinci dan mencakup aspek yang lebih luas dibandingkan dengan kriteria dari Kementerian Sosial (Kemensos). Kemensos lebih berfokus pada kondisi tempat tinggal, status kerja, khawatirnya pemenuhan kebutuhan pangan, pengeluaran pangan, pengeluaran untuk pakaian, kualitas material tempat tinggal, akses terhadap fasilitas sanitasi, dan sumber penerangan.

Metode penghitungan data kemiskinan oleh BPS dan Kemensos juga berbeda. BPS menerapkan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) melalui data makro, sementara Kemensos menggunakan data mikro. Ini menunjukkan bahwa kedua lembaga memiliki tujuan dan metode yang berbeda dalam menentukan status kemiskinan, yang dapat mempengaruhi kebijakan dan program bantuan sosial yang diimplementasikan.

Terkait demikian, pendekatan pengeluaran untuk kebutuhan minim sebagai parameter tingkat kemiskinan memiliki kelemahan, yakni konsep kemiskinan dianggap bagai tidak mempunyai individu memenuhi kebutuhan dasar serta diukur dari sisi pengeluaran per kapita. Bila kemiskinan diukur dari pendapatan penduduk, maka jumlah penduduk miskin akan lebih banyak (Zulfiqar Bin Tahir et al., 2021).

Kemiskinan merupakan masalah kompleks serta membutuhkan perumusan strategi maksimal. Program pengentasan kemiskinan di Indonesia masih terus dilaksanakan, beragam program pemberdayaan diterapkan untuk peningkatan ekonomi publik. Terkait kondisi masyarakat Indonesia pada kondisi miskin, beragam program perlindungan sosial berdampak ke kontroversi di seluruh tingkatan publik (Suleman, 2017). Dengan demikian, penting untuk melakukan langkah-langkah penanganan isu kemiskinan melalui kebijakan yang diwujudkan dalam serangkaian program pembangunan. Hal ini dikarenakan, seperti yang sudah diuraikan, masalah kemiskinan, terutama dalam konteks sosial ekonomi, merupakan tantangan utama bagi negara-negara yang sedang berkembang.

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan untuk mencapai tujuan utamanya yaitu melakukan upaya signifikan untuk mengentaskan kemiskinan. Tujuan utama program tersebut untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya pada masyarakat rentan. Meskipun dukungan dalam bentuk bantuan keuangan dan upaya meringankan beban pengeluaran rumah tangga yang sangat miskin telah memberikan dampak positif dalam jangka pendek, PKH bukanlah solusi sementara. PKH tidak hanya memberikan dukungan finansial, namun juga merancang strategi jangka panjang yang berfokus pada transformasi ekonomi dan sosial. Tujuannya adalah untuk membawa perubahan jangka panjang pada kondisi keluarga-keluarga yang menjadi sasaran program.

Dengan cara ini, PKH tidak hanya memberikan bantuan segera, namun juga ingin menciptakan landasan bagi peningkatan kesehatan jangka panjang. PKH meyakini sumber daya manusia menjadi aset sentral di pembangunan masyarakat. Terkait demikian, PKH berupaya meningkatkan kompetensi dan keterampilan keluarga terkait melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan. Program ini mempercepat proses pemberdayaan keluarga terdampak agar mereka lebih mandiri

secara ekonomi dan sosial dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pelatihan. Selain itu, PKH juga memuat unsur-unsur strategis pada pemenuhan kebutuhan dasar misalnya kesehatan serta gizi.

Melalui menciptakan lingkungan kondusif bagi tumbuh kembang anak, PKH bertujuan untuk mencapai dampak jangka panjang dengan menciptakan generasi yang lebih tangguh dan mampu menghadapi tantangan masa depan. PKH tidak hanya berperan sebagai pemberi dukungan finansial namun juga sebagai agen perubahan, mendorong perbaikan struktural dan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat yang paling membutuhkan. Program ini meletakkan dasar bagi pengentasan kemiskinan jangka panjang dengan melakukan adaptasi terhadap realitas ekonomi dan sosial keluarga penerima manfaat, sehingga menciptakan perubahan jangka panjang untuk generasi mendatang.

**Tabel 1. 1 Presentase Penduduk Miskin di Kota Surabaya Tahun 2022-2023**

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Presentase Penduduk Miskin
2022	2.972.801	138,21	4,72%
2023	3,044,413	136,37	4,65%

*Sumber: BPS Kota Surabaya data diolah oleh peneliti (2024)*

BPS tahun 2023 menyatakan kuantitas penduduk miskin di Kota Surabaya mencapai 136,37 ribu jiwa atau setara dengan sekitar 1,84% ribu jiwa. Jumlah ini berkurang bila dibanding Maret 2022 yakni 138,21 ribu jiwa. Keberhasilan Surabaya pada pengentasan kemiskinan tidak terlepas dari beragam program serta regulasi Pemkot Surabaya yang komprehensif serta terintegrasi. Berikut beberapa program unggulan yang diterapkan:

1. Program Padat Karya: Program tersebut ada keterlibatan masyarakat miskin pada proyek pembangunan serta usaha produktif, yang tidak hanya memberikan pekerjaan tetapi juga mengembangkan keterampilan. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan pendapatan jangka pendek tetapi juga membantu dalam pembangunan kapasitas jangka panjang.
2. Bantuan Sosial dan Subsidi: Bantuan langsung seperti subsidi biaya listrik dan renovasi rumah tak layak dihuni, serta kredit usaha dengan bunga rendah, merupakan langkah konkret untuk memberikan dukungan finansial langsung kepada keluarga miskin dan membantu mereka meningkatkan standar hidup mereka.
3. Pengembangan UMKM dan Kewirausahaan: Dengan alokasi anggaran yang besar, Pemkot Surabaya berinvestasi dalam masa depan ekonomi lokal melalui UMKM. Pelatihan, pendampingan, dan akses ke permodalan dan pemasaran digital adalah kunci untuk membantu UMKM tumbuh dan berkembang.
4. Peningkatan Layanan Dasar Publik: Memastikan bahwa layanan dasar misalnya pendidikan, kesehatan, air bersih, dan administrasi kependudukan mudah diakses oleh warga miskin adalah fundamental untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga.

Program Keluarga Harapan dianggap inisiatif bertujuan untuk memberi bantuan tunai ke keluarga miskin dan rentan dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi mereka serta meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks ini, penting untuk melihat distribusi penerima PKH di berbagai kecamatan di Surabaya untuk memahami sebaran bantuan ini dan seberapa besar dampaknya di tiap wilayah.

**Tabel 1. 2 jumlah penerima PKH di tiap kecamatan di Kota Surabaya tahun 2023.**

No	Kecamatan	Jumlah KPM
1.	Asemrowo	1196
2.	Benowo	286
3.	Bubutan	3091
4.	Bulak	954
5.	Dukuh Pakis	1394
6.	Gayungan	206
7.	Genteng	2976
8.	Gubeng	3174
9.	Gunung Anyar	143
10.	Jambangan	974
11.	Karangpilang	1648
12.	Kenjeran	4110
13.	Krembangan	3703
14.	Lakarsantri	959
15.	Mulyorejo	1275
16.	Pabean Cantikan	2304
17.	Pakal	659
18.	Rungkut	413
19.	Sambikerep	1572
20.	Sawahan	4887
<b>21.</b>	<b>Sempir</b>	<b>7660</b>
22.	Simokerto	6004
23.	Sukolilo	2181
24.	Sukomanunggal	2746
25.	Tambaksari	7497
26.	Tandes	1198
27.	Tegalsari	2918
28.	Tenggilis Mejoyo	368
29.	Wiyung	1111
30.	Wonocolo	919
31.	Wonokromo	1703

*Sumber: Dinsos Kota Surabaya Data diolah peneliti (2024)*

Jumlah penerima PKH di Kecamatan Semampir sebesar 7.660 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menempatkan sebagai yang paling banyak menerima bantuan PKH di Kota Surabaya. Hal ini mencerminkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketergantungan masyarakat di Sempir terhadap bantuan sosial. Fenomena ini cukup memprihatinkan karena menunjukkan adanya permasalahan struktural yang signifikan dalam kesejahteraan ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Jumlah penerima yang tinggi dapat menjadi indikator bahwa program pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat belum efektif atau belum merata di kecamatan ini.

Hingga sekarang implemmentasi PKH di Kecamatan Semampir masih terus menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan tindakan yang tepat untuk memperbaiki implementasinya. Pelaksanaan PKH di Kecamatan Semampir sebagai bagian upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di tingkat lokal. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, berbagai tantangan muncul yang menghambat keberhasilan program ini. Salah satu permasalahan yang terus muncul adalah terkait dengan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Meskipun tujuan utama PKH adalah untuk menysasar keluarga miskin yang membutuhkan bantuan, nyatanya masih terdapat sejumlah individu dan keluarga yang belum merasakan manfaat dari program ini secara merata. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmerataan dalam distribusi bantuan PKH sangat beragam. Mulai dari kurangnya informasi yang tepat mengenai kriteria penerima manfaat hingga adanya perbedaan interpretasi di antara pihak yang bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Riset kualitatif yakni prosedur riset tanpa analisis statistic. Pasolong (2012:70) mengaji riset kualitatif dari jeni data bahwa data kualitatif yakni nilai berubahnya yang tidak mampu diangkakan sehingga data kualitatif berupa kalimat, kata, skema, gambar. Sesuai paparan Pasolong (2012:72) bahwa jenis riset deskriptif yakni riset pada konstruk mandiri atau satu konstruk, yakni tanpa membandingkan atau ada keterhubungan konstruk lain. Data riset dari wawancara, catatan lapangan, dokumentasi pribadi, foto, serta dokumen resmi lain. Fokus utama riset yakni menggali serta analisa informasi terkait implementasi PKH di Kecamatan Semampir yang menjadi salah satu program perlindungan sosial dengan tujuan utama untuk peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan publik, terutama keluarga miskin serta rentan. Dalam proses analisisnya, peneliti menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van horn sebagai kerangka teoretis utama yaitu ukuran dasar serta tujuan kebijakan, sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi serta aktivitas pelaksanaan, karakter agen pelaksana, disposisi atau kecenderungan implemmentasi, kondisi lingkungan sosial, politik serta ekonomi. Tujuan riset untuk tahu pelaksanaan PKH di Kecamatan Semampir.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Melalui Analisis hasil penelitian melibatkan interpretasi hasil akhir uji dengan teori dan konsep ahli, hingga dikembangkan teori dan deskripsi hasil data

serta fakta. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, penelitian ini dapat dianalisis dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, mencakup beberapa aspek yang akan dibahas dalam penelitian ini:

### **1. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan**

Teori Van Meter dan Van Horn yang diperkuat melalui peraturan program dan pedoman pelaksanaan sesuai PERMENSOS nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Indikator tersebut melihat standar serta tujuan regulasi mampu tercapai. Standar serta tujuan dapat dilihat melalui beragam dokumen yakni peraturan program serta pedoman pelaksanaan. Standar dan tujuan PKH sebagian besar dapat tercapai Berdasarkan peraturan tersebut, PKH bertujuan untuk membantu keluarga miskin terdaftar dalam DTKS dan memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia. Proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pendamping PKH memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, yang tercermin dalam berbagai kasus penerima manfaat yang merasakan dampak positif dari program ini, terutama dalam hal peningkatan akses pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka. Evaluasi berkala juga dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan ini terus dipenuhi dan dapat memberikan manfaat yang diharapkan kepada keluarga penerima.

### **2. Sumber Daya**

Menunjukkan bahwa alokasi sumber daya yang mencakup fasilitas tempat dan metode pendistribusian bantuan yang merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan program. Berhasilnya implementasi bergaantung di kemampuan memanfaatkan sumber kebijakan yang ada. Maka dari itu, Kecamatan Semampir mengalokasikan sumber daya yang mencakup tempat sebagai fasilitas yang memadai. Meskipun ada keterbatasan anggaran keuangan, upaya pembentukan kelompok penerima PKH yang dipimpin oleh penerima sendiri merupakan strategi inovatif untuk meminimalisir pengeluaran dan memastikan efektivitas penyaluran bantuan. Pelatihan dan bimbingan teknis yang diberikan kepada tenaga kerja pendamping oleh Kementerian Sosial mencerminkan pentingnya sumber daya manusia yang terampil dalam mendukung implementasi program. Penyesuaian jumlah pendamping berdasarkan kebutuhan wilayah juga menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas kebijakan terhadap kondisi lokal, yang merupakan aspek penting dari sumber daya kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Pada sisi lain, peran pengawas di tingkat kabupaten/kota dalam mengoordinasikan pihak terkait dan memastikan program berjalan sesuai ketentuan pemerintah menegaskan pentingnya koordinasi dan pengawasan dalam implementasi kebijakan yang efektif.

### **3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan**

Teori ini menekankan bahwa korelasi baik antar instansi serta dukungan komunikasi serta koordinasi menjadi urgensi bagi keberhasilan realisasi tujuan dan sasaran program kebijakan. Dalam konteks PKH, pihak kecamatan secara intensif berkomunikasi dengan pendamping PKH dan kelurahan melalui pertemuan rutin dan koordinasi langsung untuk membahas perkembangan dan kendala yang dihadapi. Pertemuan kelompok di tingkat RT dan RW serta kunjungan rumah berkala dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mendengarkan

keluhan atau masukan dari penerima manfaat. Pendamping PKH juga aktif dalam sosialisasi program meskipun menghadapi kendala bahasa dengan masyarakat Madura. Responsivitas pendamping PKH dalam menangani kendala menunjukkan efektivitas komunikasi ini. Dukungan komunikasi dan koordinasi yang baik ini memastikan program berjalan lancar dan memenuhi tujuan membantu masyarakat, menunjukkan bahwa implementasi yang sukses sangat bergantung pada sinergi antar instansi dan komunikasi yang efektif.

#### **4. Karakteristik Agen Pelaksanaan**

Van Meter dan Van Horn menyatakan struktur birokrasi, norma serta pola korelasi di birokrasi mempengaruhi implementasi program. Dalam konteks PKH, pendamping dan koordinator memiliki struktur seleksi dan pelatihan yang ketat dan komprehensif, yang mencakup administrasi, tes tertulis, wawancara, tes kesehatan, serta pelatihan intensif. Pelatihan ini mencakup pemahaman program, teknik pendampingan, penggunaan aplikasi, dan prosedur operasional standar. Selain itu, koordinator juga menjalani pelatihan lebih lanjut dalam manajemen program, koordinasi lintas sektor, analisis data, dan pengembangan kapasitas tim. Pola hubungan yang terbentuk antara pendamping PKH, pihak kecamatan, dan kelurahan mencerminkan norma-norma kerja yang responsif dan koordinatif, yang terlihat dari komunikasi aktif melalui kunjungan langsung atau melalui WhatsApp untuk menanyakan keluhan atau kesulitan penerima manfaat. Struktur birokrasi yang terorganisir dan norma komunikasi yang baik ini mendukung efektivitas implementasi program, memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan masyarakat merasa terbantu. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik agen pelaksana yang terstruktur dan normatif berkontribusi positif terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

#### **5. Disposisi atau Kecenderungan Implementasi**

Van Meter dan Van Horn menyatakan ada aspek disposisi atau kecenderungan implementasi terdiri dari respon implementator pada regulasi, pemahaman pada regulasi serta intensitas disposisi implementator. Pertama, respon implementator terhadap kebijakan PKH terlihat positif dan proaktif, seperti yang tercermin dari usaha kecamatan dalam monitoring rutin, evaluasi berkala, serta penyelesaian keluhan dengan cepat dan efektif. Kedua, pemahaman terhadap kebijakan tampak solid, ditunjukkan oleh penerapan prosedur yang konsisten, penggunaan teknologi untuk monitoring dan pelaporan, serta pelaksanaan kebijakan dan pedoman PKH secara konsisten di lapangan. Ketiga, intensitas disposisi implementator, yang mencakup preferensi nilai, ditunjukkan oleh komitmen tinggi untuk memastikan bantuan tepat sasaran, meskipun ada beberapa keluhan tentang ketidaktepatan sasaran bantuan. Penggunaan teknologi dan peningkatan kapasitas pendamping juga mencerminkan preferensi nilai yang tinggi terhadap efisiensi dan efektivitas program. Implementator menunjukkan kecenderungan untuk terus beradaptasi dan memperbaiki proses pelaksanaan, memastikan bahwa tujuan PKH tercapai dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

#### **6. Kondisi Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi**

Kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi sangat berefek ke implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di mana hal tersebut sesuai teori



Van Meter dan Van Horn. Lingkungan sosial di Semampir, dengan banyaknya warga di bawah garis kemiskinan dan karakteristik sosial tertentu, seperti kecenderungan iri hati, menciptakan tantangan dalam penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Penghasilan yang rendah di kalangan pedagang dan buruh menuntut perhatian khusus dalam memastikan bahwa bantuan PKH benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan. Hambatan sosial ini sering kali menghambat proses seleksi penerima bantuan, karena sifat iri hati menyebabkan ketegangan di masyarakat.

Dari sisi ekonomi, program PKH terbukti membantu mengurangi beban ekonomi keluarga miskin, seperti yang dialami oleh penerima manfaat yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan biaya pendidikan anak mereka setelah menerima bantuan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan sosial, dampak ekonomi dari program ini sangat positif.

Secara politik, koordinasi dengan pihak kecamatan, meskipun sederhana dalam bentuk penyediaan lokasi untuk sosialisasi, menunjukkan adanya dukungan politik lokal yang penting untuk pelaksanaan program. Kondisi ekonomi masyarakat yang sulit dan sumber daya sosial yang terbatas menekankan pentingnya dukungan politik dan ekonomi yang kuat untuk keberhasilan implementasi kebijakan seperti PKH. Kombinasi dari tantangan dan dukungan ini menggambarkan bagaimana kondisi lingkungan sosial, politik, serta ekonomi berefek ke implementasi dan efektivitas program PKH di Semampir.

#### **D. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Berdasar analisis serta temuan di lapangan dalam pengimplementasian Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semampir dapat disimpulkan bahwa program ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Standar dan tujuan PKH yang jelas, seperti yang tercantum dalam PERMENSOS nomor 1 tahun 2018, berhasil tercapai melalui implementasi yang komprehensif. Proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pendamping PKH memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, memberikan dampak positif terutama dalam peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat.

Sumber daya kebijakan yang dialokasikan, seperti fasilitas tempat dan metode distribusi bantuan melalui bank penyalur dan kantor pos, menjadi kunci dalam mendukung efektivitas program. Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, strategi inovatif seperti pembentukan kelompok penerima PKH berhasil meminimalisir biaya dan memastikan efisiensi penyaluran bantuan. Pelatihan teknis bagi pendamping oleh Kementerian Sosial juga mendukung implementasi yang efektif, menunjukkan pentingnya sumber daya manusia terlatih dalam mendukung program ini.

Komunikasi yang baik antar organisasi, seperti kecamatan, pendamping PKH, dan kelurahan, serta responsivitas dalam menangani kendala seperti bahasa, sangat mendukung kelancaran program. Disposisi implementator yang responsif terhadap kebijakan, pemahaman yang solid, dan intensitas disposisi untuk memperbaiki proses implementasi, semuanya berkontribusi dalam memastikan

bahwa PKH tidak hanya berjalan sesuai tujuan, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi, seperti tingginya angka kemiskinan, tantangan sosial, dan dukungan politik yang terbatas, menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PKH di Semampir juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Namun demikian, dampak ekonomi positif yang dirasakan oleh penerima manfaat menunjukkan bahwa program ini berhasil mengurangi beban ekonomi keluarga miskin secara signifikan.

Secara keseluruhan, implementasi PKH di Kecamatan Semampir Kota Surabaya telah berhasil memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang holistik dan berbasis pada kebutuhan lokal. Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, program ini menjadi contoh bagaimana kebijakan publik dapat diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan sosial yang luas.

### **Saran**

Berikut saran yang diajukan:

1. Pertama, perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan program, sehingga lebih banyak keluarga miskin dapat merasakan manfaatnya.
2. Kedua, meningkatkan pelatihan dan kapasitas pendamping PKH, terutama dalam hal keterampilan komunikasi dan penggunaan teknologi, untuk memastikan pelayanan yang lebih responsif dan efisien.
3. Ketiga, memperkuat koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait melalui pertemuan rutin dan sistem pelaporan yang transparan, guna mengatasi kendala yang muncul secara cepat dan efektif.
4. Keempat, mengatasi hambatan sosial dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat PKH, sehingga dapat mengurangi sifat iri hati dan meningkatkan dukungan komunitas terhadap program.
5. Terakhir, dukungan politik lokal harus lebih ditingkatkan melalui kebijakan yang mendukung dan fasilitasi yang memadai, serta monitoring yang lebih intensif untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan tujuan program tercapai dengan optimal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aulya Wardani, W., Ismail, M., Kurniawansyah, E., & Sawaludin, S. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(4), 2189–2196. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i4.1706>
- Darwis, & Utami Ningsih. (2022). Implementation of Family Hope Program (PKH) in Palopo. In *Enrichment: Journal of Management* (Vol. 12, Issue 2).
- Dinas, R. D., Kabupaten, S., & Hilir, I. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2016-2020. In *Jurnal Dinamika Pemerintahan* (Vol. 1, Issue 1).

- Edu, E., & Rohman, A. (2019). *EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA BATU*. 8, 67. [www.publikasi.unitri.ac.id](http://www.publikasi.unitri.ac.id)
- Kasana, R. I., Herman, M., & Fibriyanita, F. (2020). *IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LOKTABAT SELATAN*. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/2623>
- Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024*.
- Kofi Annan. (2024, May 7). *SURABAYA BERHASIL MENGENTASKAN KEMISKINAN EKSTRIM MENJADI ZERO ATAU 0%*. Bappedalitbang.Surabaya.Go.Id.
- Masrul Ikhsan, Hafzana Bedasari, & Ahmad Hadi. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 3(3), 171–176. <https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.89>
- N.M.Oveta., Annisya, Alikha, & Novira. (2023). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam*.
- Nur, A. C. (2021). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. <https://www.researchgate.net/publication/350619992>
- Uswatun Chasanah, Tharisma Novitasari, Aisya Safira Nabila, & Calvin Edo Wahyudi. (2021). *IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN GAYUNGAN SURABAYA PADA ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU*. 2(5). <https://doi.org/10.59141/jist.v2i05.156>
- Yosua A. Mandolang, Florence Daicy Lengkong, & Salmin Dengo. (2019). *IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN RANOYAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN*.
- Zulfiqar Bin Tahir, S., Ode Amijaya Kamalussin, L., Hartawati, A., Yusriadi Sekolah Tinggi, Y., Hasiholan Hutapea, R., & Zulfiqar Bin-Tahir, S. (2021). *Inhibiting Factors (Internal & External) Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Bone Regency*. <https://www.researchgate.net/publication/353347514>